

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara maritim dengan wilayah lautan sebesar $\pm 3,2$ juta km^2 , menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kandungan air yang berlimpah. Seiring meningkatnya penduduk di Indonesia menjadikan tingkat kebutuhan akan air juga semakin tinggi (Pratama, 2020 : 1). Meskipun 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan luas, akan tetapi air laut bukan merupakan air baku yang dapat langsung digunakan begitu saja oleh masyarakat.

Seluruh makhluk hidup memerlukan berbagai sumber untuk keberlangsungan hidup mereka, salah satunya adalah kebutuhan akan air. Ketergantungan manusia yang begitu tinggi akan air menjadikan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia dilihat berdasarkan ketersediaan air bersih di sekitar mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa Negara memberikan jaminan bagi seluruh masyarakat akan akses terhadap air bersih sebagai kebutuhan pokok agar tercipta kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Dengan artian, akses mendapatkan air bersih merupakan hak seluruh warga negara dan pemerintah sebagai pemberi layanan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas berupa ketersediaan air bersih.

Pentingnya peran air dalam kehidupan manusia, menjadikan sektor air bersih mendapatkan perhatian karena menyangkut kehidupan banyak makhluk. Air tidak hanya memberikan fungsi sosial saja, selain itu air juga memiliki kegunaan

untuk lingkungan hidup dan ekonomi. Air sebagai sumber penghidupan manusia sangat membantu sebagai air yang layak dikonsumsi atau sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Air sangat berarti bagi keberlangsungan manusia, sehingga ketepatan pengelolaan sumber daya air dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat mutlak diperlukan (Fakhrina dalam Azizah, 2018 : 1).

Air merupakan salah satu sumber daya dimana ketersediaannya akan selalu ada dan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air juga berperan sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah untuk mencapai target utama yakni untuk mengurangi hingga setengah dari proporsi manusia yang sulit mendapatkan akses akan air bersih dan sanitasi dasar pada tahun 2015 (PBB dalam Braimah, dkk, 2016 : 406).

Sebagai lanjutan dari MDGs pada tahun 2015, disusunlah tujuan-tujuan baru untuk menangani masalah dalam pembangunan berkelanjutan dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030. Salah satu tujuan yang dirumuskan adalah mengenai akses akan air bersih dan sanitasi layak. Poin tersebut menekankan agar tercapainya akses secara universal akan air bersih dan sanitasi, mengingat masih banyak negara yang mengalami krisis mengenai masalah ini.

Sesuai dengan tujuan dari SDG's tahun 2030 yakni 100% akses tidak hanya pada air minum yang layak, namun telah menyentuh 15% tahap aman. Pencapaian akses "layak" kini tidak lagi cukup, sehingga saat ini harus dapat mencapai pada target "aman" dan telah sesuai dengan standar SDG's (Virencia, 2020 : 2).

Tabel 1.1 Data Akses Air Minum ASEAN

Negara	Akses Air Minum Layak	Akses Air Minum Aman
Singapura	0%	100%
Malaysia	3%	93%
Filipina	47%	47%
Kamboja	53%	26%
Laos	66%	16%
Brunei Darussalam	100%	0%
Thailand	100%	0%
Vietnam	95%	0%
Indonesia	89%	0%
Myanmar	82%	0%

Sumber : Joint Monitoring Program (WHO-UNICEF) 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai data akses air minum ASEAN, peringkat Indonesia masih berada di bawah. Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan layanan dasar bagi penduduk dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, salah satunya adalah bidang penyediaan air minum dan sanitasi. Apabila dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, terlihat perbedaan mencolok dimana mereka lebih unggul mengingat Indonesia memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari kedua negara tersebut (Nurul Ulya, 2020 : 1).

Indonesia menargetkan akses air minum aman dan sanitasi pada tahun 2030 semua telah merata 100%. Berdasarkan data pada bps.go.id, proporsi populasi penduduk dengan akses pada layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Indonesia di tahun 2019 baru mencapai angka 77,39%, dimana masih ditemui belum tercapainya target sebanyak 22,61%, meskipun mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya yakni 67,54% pada 2017 dan 69,27% pada 2018.

Dalam rangka pemenuhan dasar masyarakat, akan lebih tersalurkan apabila diserahkan kepada daerah. Sejalan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar, termasuk urusan pelayanan akan air minum dan sanitasi kepada masyarakat daerahnya. Sebagai jalan keluar mengenai permasalahan air bersih, maka pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat menyusun program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia yang terkendala air bersih. Program tersebut telah menjadi salah satu program unggulan nasional yang bergerak dalam peningkatan penduduk desa akan fasilitas air minum dan sanitasi layak berdasar pada masyarakat (Pamsimas, 2020 : 4). Tujuan dari Program PAMSIMAS adalah peningkatan jumlah masyarakat yang dapat dilayani di pedesaan atau pinggiran kota atas akses air bersih dan sanitasi serta diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat pada kalangan masyarakat.

Program PAMSIMAS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008-2012 dengan nama PAMSIMAS I dengan capaian sebanyak 5.200 desa yang meliputi 15 provinsi di Indonesia. Program kemudian berlanjut pada tahun 2013-2015 dengan nama PAMSIMAS II yang mampu meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan agar mendapatkan akses air dan sanitasi pada 12.000 desa (Pamsimas, 2020 : 5). Program ini telah dilaksanakan hingga tahun 2020 dan telah mencapai periode tiga dengan mengusung nama PAMSIMAS III.

Kabupaten Temanggung memiliki lokasi strategis yakni diapit oleh dua gunung dan berada di daerah dataran tinggi dimana tersedia sumber air yang besar, namun

ditemui pada beberapa desa masih kesulitan mendapatkan air bersih. Hal tersebut dikareakan masih terbatasnya fasilitas penyalur air dari sumber menuju desa. Air bersih digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga telah menjadi kebutuhan primer. Tidak hanya bersih, kualitas dari air itu sendiri juga harus mendapatkan kelayakan sebagai air yang aman untuk dikonsumsi.

Tabel 1.2 Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Kabupaten / Kota	Jumlah penyelenggara air minum	Jumlah sampel diperiksa	Memenuhi syarat (fisik, bakteriologi, kimia)	
			Jumlah	%
Kota Tegal	25	11	11	100
Brebes	124	117	105	89,74
Temanggung	338	282	211	74,82
Wonosobo	323	249	145	58,23
Purworejo	98	80	20	25,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (data diolah)

Berdasar Tabel 1.2 mengenai persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat di Jawa Tengah, dapat kita bahwa pada beberapa daerah di Jawa Tengah salah satunya yakni Kabupaten Temanggung masih berada pada angka 74,82% dimana hal tersebut masih jauh dari target yang diinginkan, yakni akses 100% untuk air minum yang aman. Melihat ada banyaknya sumber atau penyelenggara air minum yang dimiliki, akan tetapi tidak semua memenuhi syarat sebagai air yang aman untuk dikonsumsi menandakan bahwa Kabupaten Temanggung termasuk dalam daerah yang belum berhasil memberikan pelayanan dalam hal air layak konsumsi bagi masyarakat.

Permasalahan mengenai air bersih tentu berkaitan dengan bidang sanitasi. Keterbatasan dalam akses akan air bersih akan berpengaruh terhadap sanitasi layak

yang dimiliki oleh tiap masyarakat. Sanitasi layak pada tiap daerah dapat mencerminkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat pada daerah tersebut tergolong baik. Begitu pula sebaliknya, apabila angka sanitasi layak pada daerah masih rendah maka tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut tergolong kurang baik.

Tabel 1.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Salatiga	91,23	92,44	94,66	97,47	95,35
Kota Semarang	80,83	90,33	91,02	93,11	95,32
Demak	85,69	80,86	82,68	86,32	85,90
Jawa Tengah	67,20	70,66	71,84	74,19	75,68
Temanggung	27,95	32,17	32,24	42,47	45,72
Banjarnegara	23,38	27,24	22,55	20,86	24,07
Wonosobo	25,39	18,71	11,60	9,24	17,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (data diolah)

Dari Tabel 1.3 mengenai persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Jawa Tengah dapat kita lihat bahwa tiap daerah mengalami perubahan yang fluktuatif terhadap jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak per tahunnya. Berdasarkan perbandingan dengan beberapa daerah yang di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung menduduki peringkat tiga terbawah, diatas Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Apabila dibandingkan dengan Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Demak

terlihat kesenjangan yang mencolok. Bahkan kondisi sanitasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sendiri, dimana Kabupaten Temanggung berada pada angka 45,72% sementara rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada 75,68%. Masih kurangnya kepemilikan sanitasi layak pada masing-masing rumah tangga menandakan bahwa kesehatan di Kabupaten Temanggung juga belum termasuk pada kategori baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi layak di Kabupaten Temanggung masih tertinggal dari daerah lainnya.

Belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat, maka Kabupaten Temanggung memulai melaksanakan program PAMSIMAS dengan menyoar ke desa-desa yang masih mengalami permasalahan dalam pemenuhan air bersih serta sanitasi yang layak. Hingga tahun 2020, sebanyak 170 desa yang tersebar pada beberapa kecamatan telah tersaluri program PAMSIMAS sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Salah satu desa penerima Program PAMSIMAS adalah Desa Ringinanom. Desa ini terdaftar dalam PAMSIMAS III dan mulai melaksanakan program pada tahun 2018. Desa Ringinanom memiliki jumlah penduduk 1.684 jiwa yang tersebar di empat dusun dan belum mendapatkan pelayanan air minum serta sanitasi yang cukup memadai. Desa Ringinanom termasuk salah satu desa dengan sumber air yang banyak. Sebelum adanya program tersebut, masyarakat Desa Ringinanom hanya mengandalkan pada sumur dan mata air yang ada. Meskipun memiliki sumber air yang melimpah, akan tetapi tidak semua rumah dapat teraliri air dengan baik. Bagi masyarakat yang mengguakan sumur sebagai sumber air minum utama

juga mengalami kendala, yakni perbedaan kualitas dari air yang ada akibat dari kondisi tanah yang berbeda pada masing-masing rumah. Masyarakat Desa Ringinanom merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena kurangnya keterampilan untuk mengelolanya. Masyarakat hanya sekedar memasangkan pipa pada saluran irigasi sawah atau mata air yang menurut mereka dapat digunakan tanpa mengetahui kandungan dalam air tersebut apakah aman atau tidak untuk dikonsumsi. Selain itu, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dimana pendapatan yang didapatkan tidak seberapa sehingga merasa keberatan apabila menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dirasa cukup mahal.

Pembentukan suatu program tentu memiliki suatu tujuan atau efektivitasnya. Menurut Siagian dalam Lombogia dkk (2018 : 2) efektivitas berkaitan pada pelaksanaan suatu kegiatan yang meliputi ketepatan waktu, apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sebagai program yang berbasis pada masyarakat, maka kunci utama agar program dapat berjalan secara efektif adalah melalui aktifnya partisipasi dari masyarakat. Menurut Starman dalam Kunarjo (2002 : 34) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program perlu adanya faktor pendukung terselenggaranya suatu program yang bermutu, sesuai waktu, dan sesuai sasaran dimana partisipasi masyarakat berperan aktif di dalamnya. Program PAMSIMAS memiliki berbagai tujuan, salah satunya menumbuhkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan program, mulai dari pembuatan keputusan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengoperasian hingga pemeliharaan sarana yang telah dibangun serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan

di masyarakat. Sebuah program akan berjalan optimal dan mencapai efektivitasnya bila mendapatkan keikutsertaan aktif dari masyarakat sebagai pelaksanaan keberlanjutan program tersebut. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat menjadi peran penting dalam mendukung keberjalanan program PAMSIMAS pada masing-masing desa penerima.

Partisipasi masyarakat memiliki berbagai bentuk, dalam bentuk fisik yakni keikutsertaan langsung masyarakat dan dalam program maupun bentuk non fisik seperti sumbangan pikiran, tenaga, maupun dana. Soetomo dalam Lombogia dkk (2018 : 2) mengemukakan bahwa partisipasi sendiri adalah suatu peran yang didalamnya merupakan sebuah usaha untuk mengangkat taraf hidup masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat pada tingkat desa menimbulkan suatu pola hubungan timbal balik antara masyarakat dengan desa agar terpenuhinya kesejahteraan.

Pada awal perencanaan mengenai program PAMSIMAS yang akan dilaksanakan di Desa Ringinanom ditemukan fakta bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Pasalnya, dari empat dusun yang tercakup dalam Desa Ringinanom hanya ada satu dusun yang menyatakan berminat dengan program PAMSIMAS. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS di Desa Ringinanom maka tentu akan berdampak pada perencanaan program tersebut. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pemerintah desa itu sendiri. Pendekatan dari Program PAMSIMAS adalah berbasis pada peran masyarakat sebagai aktor utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

Peran dari pemerintah desa yang dirasa belum terlalu besar dimana komunikasi yang masih kurang baik menyebabkan kurang tersalurkannya aspirasi masyarakat. Pemerintah desa sebisa mungkin agar perencanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat sesuai, sehingga peran masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam kasus ini. Perencanaan merupakan unsur penting dalam mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat serta bagaimana metode yang tepat untuk digunakan ketika akan memulai suatu program. Proses perencanaan sendiri menjadi langkah awal agar suatu program yang hendak dilakukan dapat mencapai keefektifan dengan tepat dan sesuai harapan masyarakat.

Tabel 1.4 Peserta Program PAMSIMAS Desa Ringinanom Tahun 2019

Nama Dusun	Jumlah Peserta (per KK)
Dusun Karanganyar	0
Dusun Ngesrep	0
Dusun Ngodolendo	102
Dusun Ngodoringin	0

Sumber : KPSPAMS Sinar Tirta Tahun 2021 (data diolah)

Pada Tabel 1.4 mengenai peserta Program PAMSIMAS di Desa Ringinanom dapat kita lihat bahwa yang menjadi peserta program hanya masyarakat Dusun Ngodolendo yang dimana ketika perencanaan menyatakan kesediaannya terhadap program. Bahkan jumlah peserta yang terdaftar masih belum memenuhi target yang diinginkan oleh Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) Desa Ringinanom sendiri yakni 238 peserta. Kurang minatnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PAMSIMAS adalah kesadaran masyarakat akan kebutuhan mengenai air yang layak dikonsumsi di Desa Ringinanom ini masih termasuk rendah. Sebagian masyarakat merasa bahwa

sumber yang saat ini dimiliki yakni sumur-sumur telah dirasa cukup untuk dijadikan sebagai sumber air primer, sementara kualitas dari air tersebut belum diketahui aman tidaknya air untuk dikonsumsi.

Tabel 1.5 Sumber Air Minum Desa Ringinanom Tahun 2020

Sumber Air Minum	Jumlah KK	Persentase
Air Ledeng/PAM	1	0,3 %
Sumber Tidak Terlindung	43	14,2 %
Sumber Terlindung	267	85,5 %

Sumber : Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah 2020

Berdasarkan Tabel 1.5 mengenai sumber air minum di Desa Ringinanom diketahui bahwa masih terdapat 43 keluarga yang menggunakan air dari sumber yang tidak terlindung. Hadirnya program PAMSIMAS adalah untuk membantu masyarakat di daerah pedesaan maupun peri urban yang mengalami permasalahan dalam hal air bersih dan juga sanitasi. Kurangnya peran masyarakat untuk partisipasi aktif sebagai peserta program PAMSIMAS tentu akan berpengaruh terhadap keterpenuhan tujuan program dimana belum dapat dicapai secara maksimal.

Belum meratanya partisipasi masyarakat Desa Ringinanom juga menyebabkan rasa kepemilikan terhadap fasilitas yang tersedia juga rendah. Hanya masyarakat yang mendaftarkan sebagai peserta program PAMSIMAS saja yang merasa bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas yang ada, sementara masyarakat yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta program tidak terlalu ikut bertanggung jawab dalam menjaga fasilitas tersebut.

Tercapainya tujuan dapat diukur dari seberapa efektif suatu perencanaan tersebut dapat terlaksana. Soewarno dalam Insani (2016 : 3) menyatakan bahwa efektivitas sebagai suatu ukuran yang berarti tercapainya tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam program PAMSIMAS sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan agar tercapainya tujuan universal, yakni ketercapaian 100% akses akan air bersih dan sanitasi yang layak. Melihat permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan dari Program PAMSIMAS masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap Program PAMSIMAS yang telah berjalan apakah dapat mencapai keefektifitasannya, maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Hubungan Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat Dengan Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung).”** Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau hubungan dari perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Ringinanom.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan antara perencanaan dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom?
2. Apakah terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom?

3. Apakah terdapat hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas program PAMSIMAS di Desa Ringinanom.
2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara perencanaan dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom.
3. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom.
4. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Digunakan sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik. Dapat menambah pengalaman serta wawasan penulis tentang Program PAMSIMAS dan penulis dapat memperdalam ilmu tentang hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas suatu program pemerintah, khususnya tentang PAMSIMAS ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Digunakan sebagai referensi atau untuk menambah ilmu dan juga informasi bagi yang akan melakukan penelitian dengan tema dan topik yang serupa.

3. Bagi Masyarakat Desa Ringinanom

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi baik dari pengelola PAMSIMAS atau masyarakat pengguna program demi tercapainya tujuan program yaitu 100% teraksesnya air bersih dan sanitasi layak serta penerapan pola hidup bersih sehat (PHBS).

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Dapat mengetahui hubungan dari perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program PAMSIMAS. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga dalam keberjalanan Program PAMSIMAS kedepannya dapat terus berkembang dan berlangsung secara optimal.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan memperkaya teori yang akan digunakan sebagai bekal dalam penelitian serta membantu dalam penyelesaian masalah. Penulis telah menemukan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik Program PAMSIMAS diantaranya :

Tabel 1.6 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul	Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	2019	Fensy Monica Palit, Gustaaf B. Tampi, Very Y. Londa	Efektivitas Pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Jurnal Administrasi Publik UNSRAT Volume 5 Nomor 83 Halaman 17-27	Penelitian bertujuan untuk membahas tentang efektivitas dari program PAMSIMAS di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Sasaran program belum tepat karena debit air tidak mencukupi, sosialisasi program telah dilaksanakan melalui pemerintah desa kepada masyarakat, pemerintah desa juga melakukan pemantauan melalui pengawasan dan koordinasi antara pemerintah dengan pengurus PAMSIMAS.
2.	2019	Asminar	Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Rangka Menyukkseskan Pamsimas III di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Journal of Regional and Rural Development Planning Volume 3 Nomor 1 Halaman 35	Mengetahui seberapa tinggi partisipasi dan swadaya masyarakat untuk dalam peningkatan <i>universal access</i> serta pengaruh program Pamsimas terhadap akses air bersih di desa.	Metode campuran dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan korelasi sederhana dan regresi linear berganda.	Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada tiap tahapnya, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dalam bidang swadaya pun ditemukan bahwa angka yang didapat telah berhasil melebihi syarat yang ditentukan oleh Program Pamsimas itu sendiri. Hasil korelasi didapatkan berada pada angka 0.992 dan tingkat aksesibilitas Program Pamsimas III terhadap ketersediaan air di Kabupaten Bungo juga dinilai tinggi sebesar 0.815 atau 81.5%.
3.	2020	Marulis, Tri Sukirno dan Yusni Maulida	Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis	Pekbis Jurnal Volume 12 Nomor 3 Halaman 248-259	Menganalisis partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas dan menemukan apa saja	Eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif dengan	Partisipasi masyarakat pada program PAMSIMAS di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik. Bentuk partisipasi diantaranya dalam perencanaan yakni

			Masyarakat (Pamsimas) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar		bentuk dari partisipasi yang diberikan	menggunakan metode rata-rata.	keterlibatan rapat serta musyawarah, pada pelaksanaan kegiatan seperti keterlibatan dalam pengelolaan, pengawasan, dan penyaluran ide, kemudian dalam pemanfaatan yakni masyarakat berpindahnya penggunaan sumber air dan sanitasi dari program PAMSIMAS.
4.	2017	Atik Rochaeni, Bambang Somantri	Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung)	Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Volume 10 Nomor 1	Berfokus pada koordinasi dan perencanaan sebagai determinan untuk meraih efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung yang dirasakan masih belum optimal.	Eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis menggunakan <i>Pearson Product Moment</i>	Variabel perencanaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan yakni sebesar 67,00% dan parsial sebesar 56,40%, variabel koordinasi memberikan pengaruh sebesar 43,70% terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung,
5.	2012	Tubagus Rubal Faisal	Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Tesis Universitas Indonesia	Bertujuan mencari seberapa besar pengaruh dari perencanaan serta koordinasi terhadap efektivitas Program Penanggulangan	Kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda	Dari hasil pengujian hipotesis dua rata-rata diketahui apabila terdapat kesamaan pandangan dari Tim Pelaksana dan Pengguna terhadap variabel perencanaan, koordinasi, dan efektivitas kegiatan P2KP. Pada model regresi berganda, variabel perencanaan dan koordinasi memberikan

			Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang		Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang.		pengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas program kegiatan P2KP. Variabel efektivitas P2KP memberi respon lebih pada variabel perencanaan dibandingkan dengan variabel koordinasi. Terdapat variabel lain yang mempengaruhi kegiatan P2KP seperti faktor budaya, tingginya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan ketaatan terhadap hukum.
6.	2017	Latif Priatna	Pengaruh Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Mencari tahu adanya pengaruh signifikan antara perencanaan dan partisipasi secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.	Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif	Hasil olahan data secara parsial menghasilkan perencanaan 3,200 dengan tingkat signifikansi 0,002, partisipasi sebesar 4,976 dengan signifikansi 0,000. Secara simultan perencanaan dan partisipasi sebesar 35,92 > 3,15 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan dan partisipasi terhadap efektivitas. Nilai <i>R Square</i> sebesar 0,533 menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independent sebesar 53,3%, sedangkan sisanya 46,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
7.	2017	Rahmi Yetri Kasri, Paulus Wirutomo,	<i>Citizen Engagement to Sustaining Community-Based</i>	<i>International Journal of Development</i>	Memahami elemen dasar yang membentuk dan mempengaruhi	Kualitatif dengan pendekatan eksploratif.	Studi menemukan bahwa kesesuaian warga dan keterlibatan pemerintah dalam implementasi rencana strategi pada

		Haryoto Kusnoputranto, Setyo Sarwanto Moersidik	<i>Rural Water Supply in Indonesia</i>	<i>Issues Volume 16 Issue 3 Pages 276-288</i>	keterlibatan warga negara dalam menopang penyediaan layanan air pedesaan di Indonesia		seluruh bagian siklus merupakan kunci dalam penyampaian layanan berkelanjutan. Keberlanjutan tersebut lebih dipengaruhi oleh struktur unsur-unsur seperti kebijakan pemerintah, tata kelola program, peran sosial, dan sumber air selain oleh unsur sosial budaya.
8.	2018	Siti Robiah Nurbaiti dan Azis Nur Bambang	<i>Literature Study in Community Participation in Community Based Rural Water Supply and Sanitation Programs</i>	<i>E3S Web of Conference Volume 31 Pages 1-4</i>	Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat beserta faktor yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).	Studi literatur	Bentuk partisipasi dari masyarakat dalam Program PAMSIMAS ini berupa sumbangan uang, pemikiran, tenaga, materi, dan pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi berasal dari internal masyarakat sendiri yakni karakteristik individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar seperti peran aparat desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, LSM, dan pendamping atau fasilitator.
9.	2020	Muhammad Arsyam, Nurfatimah, Ibnu Hajar, Andi Jusmiana, Zulkifli Makmur, dan Syamsul Alam	<i>Changes in Community Attitudes and Their Participation in the Community Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Gowa Regency</i>	<i>OSF Preprints</i>	Mencari tahu mengenai perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat melalui adanya program PAMSIMAS	Kualitatif	Program PAMSIMAS di Desa Belabori telah dilaksanakan oleh masyarakat melalui musyawarah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharannya. Kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi program di semua tahapan dapat dilihat dari pemeliharaan PAMSIMAS. Dapat disimpulkan bahwa program

							PAMSIMAS memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama perubahan perilaku masyarakat.
10.	2018	Andi Budiawan, Mohd Haizam Mohd Saudi, dan Deden Sutisna	<i>The Effect of Planning and Coordination towards Work Effectiveness at Faculty of Business and Management in Widyatama University, Bandung</i>	<i>International Journal of Engineering & Technology Volume 7 Issue 4.34 Pages 348</i>	Mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan dan koordinasi secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas kerja dosen tetap Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.	Kuantitatif dengan teknik analisis data uji multikolinearitas, uji normalitas, dan regresi linear berganda	Terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel perencanaan dan koordinasi baik sebagian atau bersamaan. Korelasi Pearson (R) diperoleh hasil sebesar 0,831 yang berarti hubungan antara perencanaan dan koordinasi dengan efektivitas pegawai sangat kuat. Melalui R Square (R ²) sebesar 0,894, koefisien determinasi (KD) sebesar 86,70% yang berarti efektivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh variabel perencanaan dan koordinasi sebesar 86,70% dan 10,60% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 1.6 mengenai perbandingan penelitian terdahulu yang telah penulis dilakukan, fokus penelitian yang dilakukan bermacam-macam seperti melihat efektivitas program, mengetahui tingkat partisipasi masyarakat beserta bentuk dan faktor yang mempengaruhinya, mencari tahu perubahan perilaku masyarakat setelah adanya program, serta mencari besarnya pengaruh dari perencanaan dan koordinasi terhadap efektivitas program. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini, penulis mengambil fokus untuk menilai tentang “Analisis Hubungan antara Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat dengan Efektivitas Program PAMSIMAS” dimana pada studi terdahulu belum adanya pembahasan untuk menganalisis hubungan antara perencanaan dan partisipasi secara bersamaan dengan efektivitas program PAMSIMAS. Lokus yang akan diteliti juga belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif karena bermaksud untuk mencari tahu hubungan antara variabel bebas (X) yakni perencanaan dan partisipasi masyarakat kepada variabel terikat (Y) yakni efektivitas program PAMSIMAS. Kemudian teknik analisis yang digunakan juga berbeda, yakni menggunakan teknik analisis korelasi *Kendall Tau*, koefisien konkordansi Kendall, dan juga koefisien determinasi.

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi banyak diartikan dalam ruang lingkup ketatausahaan atau pada hal yang berkaitan dengan pengaturan berkas, pembuatan laporan, dan sebagainya. Akan tetapi beberapa ahli mengemukakan pendapat yang dapat menepis anggapan itu selama ini. Herbert A. Simon dalam Pasolong (2017 : 7) mengartikan administrasi sebagai kegiatan kerjasama antar kelompok dalam

pencapaian tujuan bersama. Kemudian Pasolong (2017 : 9) juga memberikan pengertian mengenai administrasi yakni kerjasama oleh sekelompok orang atas sebuah pekerjaan yang telah direncanakan agar mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan rasional. The Liang Gie dalam Anggara (2016 : 5) mendefinisikan administrasi merupakan rangkaian kegiatan pada suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerja sama. Ahli ini juga menganggap bahwa administrasi sangat cocok untuk digunakan masyarakat, karena berkaitan dengan artiannya yang mencakup pencapaian tujuan, melayani masyarakat serta kerjasama yang menjamin tercapainya tujuan.

Dalam kaitannya dalam negara, administrasi lebih dikenal dengan sebutan administrasi negara atau yang saat ini mengalami peralihan sebagai administrasi publik. Hal tersebut karena dalam istilah administrasi negara posisi negara adalah sebagai pihak yang dilayani, bukan melayani masyarakat. Akibat hal tersebut terbentuk stigma dalam masyarakat bahwa mereka harus selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh negara dan memunculkan rasa takut apabila tidak dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan negara. Berangkat dari dasar tersebut, maka terjadinya peralihan menjadi administrasi publik dimana kata publik disini lebih menekankan pada warga negara yang memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara (Pasolong, 2017 : 9). Adanya peralihan ini menjadikan posisi negara tidak lagi sebagai pihak yang dilayani, melainkan pihak yang melayani masyarakat.

Administrasi publik memiliki berbagai artian menurut beberapa pendapat ahli. Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 2) mengartikan administrasi publik sebagai rangkaian proses yang dilakukan oleh personil publik secara terorganisir

dalam kebijakan publik, mulai dari formulasi, implementasi, hingga pengelolaan keputusan. Marshal E. Dimmock, Gladys O. Dimock, dan Louis W. Koenig dalam Pasolong (2017 : 10) mengartikan administrasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan urusan politik mereka. Masih dalam Pasolong, Nigro dan Nigro mendefinisikan administrasi publik sebagai proses kerjasama antara kelompok dengan lingkup pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan hubungan diantara keduanya, yang mana memiliki peran penting untuk merumuskan kebijakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian ahli diatas, memang sulit untuk mendeskripsikan administrasi publik dalam rangkaian kata yang singkat sehingga penulis mengartikan bahwa administrasi publik merupakan proses kerjasama antara kelompok atau lembaga negara yakni legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang saling terorganisir dalam mengelola urusan pemerintahan dan berperan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu ilmu dapat kita lihat melalui paradigma yang selalu mengalami perubahan. Robert T Golembiewski dalam Syafiie (1998 : 12) menganggap paradigma sebagai standar disiplin ilmu yang dilihat melalui focus dan locusnya. Focus disini berarti kajian apa atau bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Sementara locus melambangkan lokasi diterapkannya ilmu pengetahuan.

Ilmu administrasi publik telah mengalami beberapa perubahan paradigma dalam perkembangannya. Nicholas Henry dalam Keban (2014) memberikan pendapat mengenai pergeseran paradigma administrasi publik diantaranya :

1. Paradigma I (1900-1926) : Dikotomi Politik dan Administrasi

Pada paradigma ini mengaitkan administrasi dan politik sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Politik sebagai kebijakan yang dibuat dan administrasi sebagai pelaksanaan kebijakan. Paradigma ini tidak bertahan lama dikarenakan hanya menitikberatkan pada lokus yakni pada birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma II : Prinsip-Prinsip Administrasi

Pada paradigma ini dikenal istilah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang berkaitan dengan manajemen. Berfokus pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjalankan sebuah administrasi negara dan dapat diberlakukan secara universal.

3. Paradigma III : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Paradigma ini berpendapat bahwa administrasi tidak dapat terpisahkan. Prinsip-prinsip administrasi yang sebelumnya ada dinilai tidak relevan untuk diterapkan secara universal dan lebih berfokus pada politik birokrasi. Pada akhirnya administrasi publik tidak diakui sebagai ilmu politik apabila dilihat dari kaca mata politik.

4. Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Paradigma ini sebagai alternatif dari paradigma sebelumnya dengan mengembangkan prinsip manajemen pada paradigma sebelumnya. Terjadi dua perkembangan pada paradigma ini yakni pengimplementasian pengembangan ilmu administrasi publik yang nantinya berorientasi pada kebijakan publik.

5. Paradigma V : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Pada paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus pada teori organisasi, praktek dalam analisis kebijakan publik, dan manajemen dengan lokus pada birokrasi pemerintah serta *public affairs*.

6. Paradigma VI : *Governance*

Konsep *governance* biasa didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan para pimpinan politik dalam rangka mensejahterakan rakyat mereka, dengan posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pelaksana, dan penyebarluasan kebijakan publik dan langsung memberikan pengaruh.

Sesuai dengan paradigma yang telah dijabarkan, pelaksanaan dari program PAMSIMAS mengarah pada paradigma keenam yakni *governance*, dimana posisi program sebagai perantara yang disusun oleh pemangku jabatan dan berfungsi sebagai kesejahteraan masyarakat mereka yakni berfokus pada penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. Kehadiran program turut membantu meminimalisir permasalahan sosial yang tengah dialami masyarakat. Dalam keberjalanan program, masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dikarenakan program PAMSIMAS ini berbasis pada masyarakat dimana seluruh kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi sepenuhnya dipegang oleh masyarakat. Pada akhirnya dampak yang dihasilkan dari terlaksanakannya program akan dirasakan sendiri oleh masyarakat.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan menunjuk kepada serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan. Kebijakan mengacu pada serangkaian aktivitas yang disebabkan oleh proses yang

melibatkan hubungan organisasi dan peran agen kebijakan (Handoyo, 2012 : 21). Menurut Henz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Mutofi'ah (2020 : 11) kebijakan adalah keputusan permanen yang ditandai dengan struktur dan pengulangan perilaku dari pengambil keputusan dan orang yang patuh pada keputusan tersebut.

Kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Pembuatan suatu kebijakan dapat dilakukan secara sengaja dengan keinginan mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagai suatu disiplin ilmu, kebijakan publik merupakan suatu ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Islamy dalam Anggara (2016) memberikan pandangan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian berupa tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Sebagai suatu disiplin ilmu kebijakan sendiri tercipta melalui perundang-undangan.

Menurut Riant Nugroho dalam Fitriani (2020 : 18) kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh negara, pemerintah pada utamanya sebagai sebuah langkah untuk mewujudkan tujuan negara. Adapun kebijakan publik menurut Easton dalam Thoha (2002 : 65) dirumuskan sebagai suatu alokasi nilai yang bersifat otoritatif kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam pengertian ini kebijakan bertindak sebagai pengatur masyarakat dimana isi yang ada didalamnya bersifat memaksa. Pelaku yang bersifat otoritatif hanya dilakukan oleh pemerintah, dimana hal yang harus dilaksanakan atau tidaknya bergantung pada pemerintah itu sendiri.

Hogwood dan Gunn dalam Indiahono (2017 : 13) membagi kebijakan menjadi 10 artian :

1. Sebagai label untuk sebuah bidang kegiatan
2. Sebagai ungkapan tujuan umum atau kegiatan negara yang diinginkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otorisasi formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai sebuah hasil (*outcome*)
9. Sebagai teori dan model
10. Sebagai sebuah proses

Keban dalam Tahir (2015 : 32) memberi pengertian kebijakan publik menjadi tiga bagian, pertama yakni sebagai produk dimana sebuah kebijakan dianggap sebagai rangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Kedua yakni sebagai proses, kebijakan merupakan alat yang dapat digunakan organisasi untuk menemukan harapan. Ketiga adalah sebagai kerangka kerja dimana kebijakan merupakan proses tawar menawar untuk merundingkan masalah dan metode penerapannya.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu produk berbentuk rangkaian aktivitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta memecahkan permasalahan yang dialami masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bersifat untuk dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam Fitriani (2020 : 18) yang menyebutkan bahwa kebijakan merupakan keputusan pemerintah sebagai langkah mewujudkan tujuan negara, maka relevansi teori kebijakan publik terhadap fokus

yang diambil peneliti yakni terkait dengan pemenuhan tujuan dalam bidang penyediaan sumber daya air dan sanitasi, maka pemerintah mencetuskan sebuah kebijakan dalam bentuk program yaitu Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

1.5.5 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang memiliki artian yakni berhasil. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan efektivitas yang bermula dari kata efektif memiliki arti menghasilkan efek, akibat, pengaruh, manfaat, dan hasil. Sementara itu Ensiklopedi Nasional Indonesia, kata efektivitas merujuk pada cara menunjukkan keberhasilan dari sudut pandang sasaran yang ditetapkan sebelumnya, apakah berhasil dicapai atau tidak. Ketinggian efektivitas akan terlihat apabila hasil yang ditunjukkan semakin mendekati tujuan.

Efektivitas telah menjadi hal dasar dalam dalam pencapaian target yang telah ditetapkan baik dalam organisasi, kegiatan, maupun sebuah program. Dapat terbilang efektif apabila target tersebut berhasil dicapai. Sejalan dengan pendapat H. Emerson dalam Fitriani (2018 : 24) dimana efektivitas merupakan pengukuran atas pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Effendy dalam Amelia (2015 : 9) mengatakan efektivitas merupakan suatu hubungan dimana waktu, biaya, dan tenaga yang ditetapkan sebelumnya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Kata efektivitas didefinisikan dengan artian yang beda-beda oleh beberapa pakar. Menurut Supriyono, efektivitas adalah kaitan antara tanggung jawab pusat dengan tujuan yang ingin diraih. Robbins dalam Sari (2017 : 30) menyatakan efektivitas merupakan titik capaian organisasi baik dalam kurun waktu pendek atau

panjang. Menurut Baego Ishak dalam Aprillita (2017 : 47), efektivitas adalah suatu susunan kegiatan yang secara teratur, bertahap, cermat dan dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan.

Penilaian dalam suatu kesesuaian program termasuk salah satu cara dalam mengukur efektivitas suatu program. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Hani Handoko dalam Jibril (2017 : 52) dimana efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, dimana antara kontribusi dan nilai efektifan akan bernilai sebanding. Apabila kontribusi yang diberikan besar maka besar pula efektivitas organisasi, program, atau suatu kegiatan tersebut.

Campbell J.P dalam Amelia (2015 : 18) merumuskan ukuran efektivitas secara umum diantaranya adalah:

1. Keberhasilan program

Efektivitas suatu program dapat ditinjau dari sistem dan hasil yang ada di lapangan. Efektivitas program dapat dilaksanakan berupa pemasukan berbagai program kerja dan telah sesuai dengan tujuan awal.

2. Keberhasilan sasaran

Pengukuran efektivitas dapat dilihat melalui segi keluaran atau *output* yang dihasilkan. Artinya efektivitas diukur melalui seberapa jauhnya hasil dari sebuah program dan prosedur yang dilakukan organisasi dalam pencapaian tujuan.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan berarti ukuran efektivitas dimana dapat ditinjau dari sisi penerima, yakni pemenuhan kebutuhan penerima program. Tingginya kepuasan yang diterima oleh peserta program, berdampak pada meningkatnya

efektivitas kebijakan yang berjalan. Dengan tingginya kepuasan terhadap program tersebut maka dapat memberikan keuntungan bagi lembaga atau organisasi penyelenggara program.

4. Tingkat input dan output

Sebuah efektivitas dapat dilihat melalui pemasukan dan keluaran suatu program. Apabila keluaran yang dihasilkan lebih besar dari pemasukan, maka dapat dikatakan program tersebut telah berjalan efektif. Namun sebaliknya, apabila output yang dihasilkan lebih kecil dari input, maka dapat dikatakan program tersebut belum berjalan efektif.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauhmanakah sebuah kebijakan dapat berjalan mencapai tujuan merupakan salah satu ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell.

1.5.5.1 Efektivitas Program

Menurut Subagyo dalam Aprillita (2017 : 48) indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas program yaitu :

1. Ketepatan Sasaran Program

Sampai sejauh mana objek yang disasar oleh program tersebut tepat dan sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Kemampuan dari penyelenggara program untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai program agar dapat diterima oleh masyarakat, khususnya adalah target atau objek dari program.

3. Tujuan Program

Tujuan berarti kesesuaian dari sesuatu yang hendak dicapai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam konteks ini tujuan berarti sejauh mana program tersebut berjalan dan kesesuaian hasil yang didapat dengan rencana sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara program pasca terlaksananya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta.

Untuk mengukur efektivitas program, Sutrisno dalam Pertiwi (2017 : 420) memberikan identifikasi diantaranya adalah:

1. Pemahaman program

Pada hal ini, efektivitas dilihat dari sejauh mana pemahaman dari masyarakat terkait dengan program.

2. Tepat sasaran

Melihat dari apa yang diinginkan dapat menjadi kenyataan atau tidak.

3. Tepat waktu

Melihat apakah program telah mampu berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak.

4. Tercapainya tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai. Efektivitas diukur dengan melihat tujuan apa saja yang telah berhasil terealisasikan. ‘

5. Perubahan nyata

Adanya suatu program dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh atau perubahan. Dalam hal ini, efektivitas diukur dengan melihat sampai mana program mampu memberikan suatu efek serta perubahan nyata bagi masyarakatnya.

Efektivitas program juga didefinisikan oleh Betten T.R (1979 : 87) yang mengartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang dicapai secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat dengan indikator pengukuran diantaranya :

1. Peningkatkan kondisi dan taraf hidup masyarakat, seperti peningkatan kesehatan, peningkatan taraf hidup, peningkatan kesejahteraan, dan sebagainya.
2. Partisipasi masyarakat dilihat dari peningkatan kesadaran dan kemampuan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi tercapainya tujuan.

Gibson dalam Kurniawan (2005 : 57) memberikan ukuran akan efektivitas program diantaranya :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Lain dari pendapat Epstein dalam Dharma (2004 : 131) menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas dari suatu program dapat dilihat melalui :

1. Kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol.
2. Adanya program layanan khusus untuk pemenuan keperluan masyarakat.
3. Mengukur kualitas pelayanan pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan ukuran persepsi dan kepuasan masyarakat.
4. Pemberi layanan diharap mampu beradaptasi dengan persoalan yang dialami masyarakat.

Dalam menilai efektivitas suatu program, tentu terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Menurut Robbin (1990 : 53-54) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas program, diantaranya :

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Adanya sistem nilai yang dianut
3. Struktur organisasi yang jelas
4. Adanya keikutsertaan manusia dalam keberlanjutan program

Starman dalam Kunarjo (2002 : 126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri pandangan akan efektifitas suatu program perlu adanya faktor pendukung terserlenggaranya program tersebut agar mampu berjalan sesuai dengan waktu dan sasaran serta bermutu. Faktor tersebut berupa :

1. Peranan pendamping, antara lain membantu kelompok sasaran dalam memperkuat internal dengan mematangkan organisasi, membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan, dan menjadi jembatan antara kelompok sasaran dengan potensi dari luar.

2. Partisipasi masyarakat, yang dinilai melalui kontak dengan kelompok sasaran serta aktif dari perencanaan hingga penilaian program.
3. Kemampuan kelompok sasaran, masyarakat diharapkan dapat menjadi pihak yang menikmati hasil suatu program sehingga harus ditentukan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat.

Cahyono (1983 : 54) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi efektivitas program diantaranya :

1. Unsur sumber daya manusia

Unsur sumber daya manusia memiliki peran besar dimana manusia sebagai faktor utama agar seluruh kegiatan dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Dalam suatu program unsur sumber daya manusia dilihat dari partisipasi masyarakat yang turut berperan selama pelaksanaan program sehingga efektivitas dapat terwujud.

2. Unsur sumber daya bukan manusia

Unsur ini merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang berperan sebagai pendukung, seperti modal, tenaga kerja, mesin peralatan dan sebagainya.

3. Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan

Hasil menjadi tujuan akhir dari suatu program sehingga agar tercapai perlu adanya sebuah perencanaan yang matang dengan melibatkan kedua unsur lainnya, yakni sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia.

Dari penjelasan mengenai efektivitas program yang telah dijabarkan diatas, sebuah kesimpulan dapat ditarik bahwa efektivitas program adalah sebuah

ukuran dari suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa indikator yang berperan sebagai penentu apakah suatu kebijakan atau program tersebut telah berlangsung dengan efektif selama keberjalanannya. Efektivitas suatu program terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah perencanaan dan juga partisipasi masyarakat. Sehingga dalam mengukur suatu efektivitas program dapat diturunkan dari teori efektivitas program.

1.5.6 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dipersiapkan untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan berupa pedoman, garis besar, atau petunjuk yang ditaati dalam rangka mencapai hasil yang baik (Taufiqkurokhman, 2008 : 3). Bintoro Tjokroaminoto dalam Usman (2008 : 6) berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan urutannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sondang P. Siagian (1984 : 6) memberikan definisi perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentan matang akan hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat Middleton dalam Suranto (2019 : 23) yang memberikan pengertian perencanaan sebagai teori yang diterapkan dengan kenyataan dimana langkah-langkah yang ditentukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Roger A. Kaufmann dalam Amanah (2003 : 3) perencanaan ialah gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan demi mencapai tujuan yang

lebih baik, memiliki nilai, dan memiliki elemen. Beberapa elemen yang dimaksud diantaranya :

1. Mengidentifikasi kebutuhan
2. Memilih kebutuhan berdasarkan prioritas guna pengambilan keputusan
3. Perincian mengenai hasil yang perlu dicapai untuk tiap kebutuhan
4. Susunan hasil yang dicapai dalam memenuhi kebutuhan
5. Identifikasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah
6. Identifikasi strategis dan taktik alternatif untuk memenuhi kebutuhan

Perencanaan yang baik mencerminkan kemampuan pada saat ini dan peluang pada masa depan. Perencanaan memiliki kegunaan penting, yakni sebagai pedoman untuk menjalankan sebuah program, kegiatan maupun kebijakan. Sebuah program atau kebijakan yang terlaksana dengan baik tentu berasal dari perencanaan yang matang. Atas dasar tersebut, maka pembuatan rencana harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, mengingat masyarakat merupakan kelompok sasaran dari pembuatan suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan Ogotan, dkk (2015 : 6) terdapat beberapa ukuran dalam menilai perencanaan suatu program diantaranya :

1. Kejelasan tujuan dari program yang direncanakan.
2. Kesesuaian antara perencanaan program dengan keinginan, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat.
3. Kesesuaian antara perencanaan program dengan keadaan lokasi dilaksanakannya program.

4. Tingkat kesesuaian program dengan peluang sumber daya alam dan sumber daya manusia di lokasi dilaksanakannya program.
5. Kejelasan spesifikasi kegiatan (waktu, dana, pelaksana) program yang akan dilaksanakan.

Dalam PAMSIMAS, perencanaan program menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Partisipasi, prinsip ini ditujukan untuk mendorong keikutsertaan setiap individu yang ada di masyarakat.
2. Kesetaraan dan inklusif, yang berarti semua anggota masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama atas akses, kesempatan partisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta manfaat yang diperoleh.
3. Berorientasi pada target pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi.

1.5.7 Partisipasi Masyarakat

1.5.7.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat ditafsirkan sebagai suatu proses dimana warga ikut, terlibat, dan bersama baik secara individu, kelompok sosial ataupun organisasi yang berangkat atas kesadaran dari pribadi tanpa ada paksaan dari pihak lain (Rahardjo, 2018 : 23). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikemukakan oleh Badudu, partisipasi berasal dari bahasa Belanda *participatie* dan bahasa Inggris *participation* yang memiliki artian ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan, perhatian maupun sumbangan dari kelompok yang berpartisipasi yakni masyarakat (Pasaribu dalam Petrus Lende

Ngongo, 2017 : 61). Dalam menciptakan dan menggerakkan peran masyarakat, Pasaribu mengemukakan terdapat lima hal yang mendasari hal tersebut diantaranya:

1. Adanya rasa senasib, sepenanggungan, rasa bergantung dan rasa saling terkait. Tumbuhnya rasa tersebut dalam masyarakat maka dapat menjadi pemicu munculnya partisipasi yang tinggi.
2. Adanya keterikatan dengan tujuan hidup. Rasa keterikatan dengan tujuan hidup akan membawa dampak lebih besar dalam partisipasi masyarakat. Rasa tersebut akan menjadi kekuatan bagi masyarakat, apabila tujuan hidup antar masyarakat saling terikat maka akan timbul kemauan diri dalam mencapai tujuan tersebut secara bersama.
3. Keahlian yang dimiliki masyarakat. Tiap manusia tentu memiliki keahlian yang berbeda pada masing-masing individunya. Keahlian tersebut dapat dipergunakan untuk memicu terciptanya partisipasi dengan menempatkan secara tepat sesuai dengan keadaan.
4. Adanya pemrakarsa atau orang yang menginisiasi terwujudnya partisipasi masyarakat. Pemrakarsa ini termasuk salah satu syarat utama dalam menciptakan partisipasi dalam masyarakat.
5. Iklim partisipasi, sebagai langkah terciptanya partisipasi maka harus menciptakan terlebih dahulu iklim atau lingkungan. Terbentuknya iklim akan menjadikan partisipasi menjadi lebih mudah untuk tumbuh.

Menurut pendapat dari Adiasasmita dalam Latif (2019 : 7), terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar perlunya partisipasi dari masyarakat yaitu :

1. Masyarakat memahami keadaan disekitar mereka, baik lingkungan sosial maupun ekonomi.

2. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mempelajari sebab akibat dari berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya.
3. Masyarakat mampu memberikan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapinya.
4. Masyarakat mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, uang atau teknologi yang dimiliki sebagai sarana pencapaian tujuan mereka.
5. Masyarakat mampu memberdayakan diri mereka dengan memperluas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak luar.

Berbeda dengan pendapat Diana Conyers dalam Purnomo (2015 : 34), terdapat alasan penting bahwa partisipasi memiliki peran penting diantaranya :

1. Partisipasi masyarakat menjadi perantara untuk mendapatkan informasi perihal kondisi, kebutuhan serta sikap dari masyarakat.
2. Masyarakat akan lebih memberikan kepercayaan pada suatu program apabila mereka merasa dilibatkan, terutama ketika proses perencanaan karena masyarakat akan lebih mendalami program serta adanya rasa kepemilikan.

Mardjiono dalam Purnomo (2015 : 36) mengartikan partisipasi sebagai peran masyarakat pada suatu kegiatan. Lebih lanjut, partisipasi dijelaskan sebagai upaya keikutsertaan masyarakat pada setiap program pembangunan yang ada. Sejalan dengan Mubyanto dalam Purnomo (2015 : 36) yang memberikan penjelasan mengenai partisipasi sebagai suatu upaya kesedian dalam membantu keberhasilan tiap program dan disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap orangnya. Partisipasi memiliki makna sebagai elemen yang menyumbang masyarakat agar dapat tumbuh

sesuai dengan potensi dan keahlian mereka, terlibat secara aktif ketika penyelenggaraan pemerintahan sehingga dampak positif dari kebijakan yang dicetuskan pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat (Latif et al., 2019 : 7).

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan suatu usaha secara sadar dan tanpa paksaan yang muncul dari dalam diri individu pada suatu kelompok masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut terlibat dan memberikan kontribusi secara penuh baik dalam bentuk material ataupun non material demi tercapainya tujuan program.

1.5.7.2 Bentuk dan Tahapan Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Fitriani (2020 : 31) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan program, pembuatan program, pelaksanaan program dengan memberikan kontribusi baik berupa sumberdaya atau melakukan kerjasama dengan organisasi, berbagi manfaat serta melakukan evaluasi. Mereka juga memberikan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat agar lebih mudah dipahami dan lebih nyata terjadi pada masyarakat dalam empat tahapan yaitu :

1. Partisipasi ketika mengambil keputusan (*participation of decision making*).

Pada jenis ini partisipasi terkait dengan sumbangan ide atau gagasan yang diberikan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan bersama. Bentuk nyata diberikan ketika rapat dalam bentuk gagasan atau kehadiran, diskusi mengenai persetujuan atau penolakan program yang ditawarkan. Partisipasi ini bertujuan agar dalam perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi dalam keberlaksanaan (*participation in implementation*), dalam hal ini meliputi menjalankan sumbangan dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan sosialisasi program. Partisipasi dalam keberlaksanaan menjadi tindak lanjut dari rencana yang telah disusun sebelumnya sehingga peran partisipasi dalam hal ini sangat penting agar rencana yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal.
3. Partisipasi dalam kebermanfaatan (*participation in benefit*). Hasil dari kegiatan atau program yang telah berjalan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat terlihat melalui *output* sementara kuantitas terlihat dari persentase keberhasilan. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maka keberhasilan dari program tersebut semakin sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pada tahapan ini partisipasi yang diberikan berbentuk tenaga serta dana untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Pelaksanaan kegiatan atau program sebisa mungkin sesuai dengan perencanaan, sehingga peran partisipasi masyarakat dalam hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Ndraha dalam Mulyawan (2016 : 3) menyebutkan beberapa bentuk atau tahapan dari partisipasi, diantaranya :

1. Partisipasi dengan atau melalui pihak lain sebagai permulaan perubahan.
2. Partisipasi dalam memperhatikan dan memberikan perhatian terhadap informasi untuk diterima ataupun ditolak.

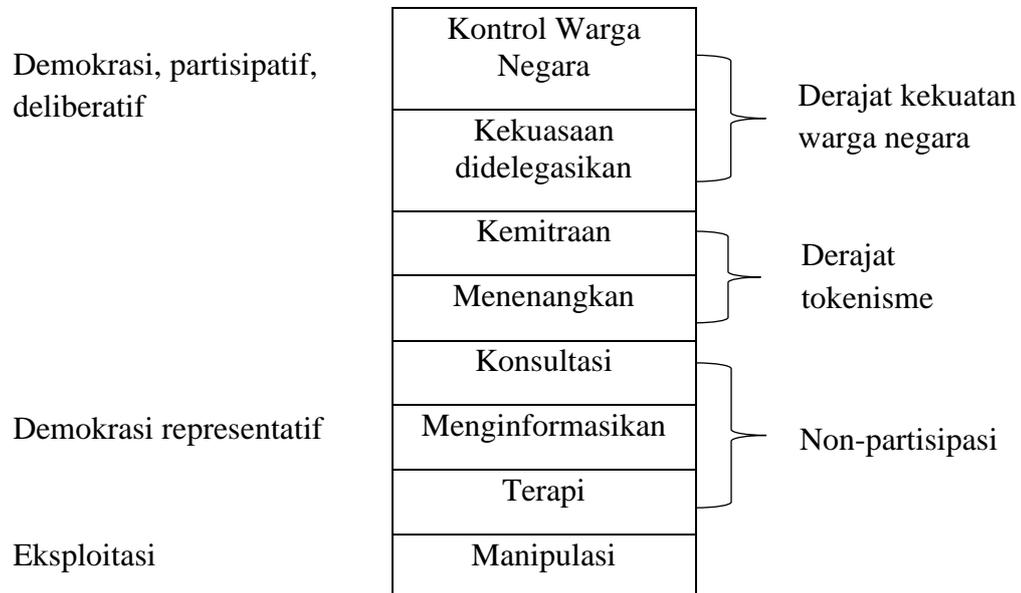
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan yakni dalam pengambilan keputusan.
4. Partisipasi ketika pelaksanaan pembangunan.
5. Partisipasi ketika menerima, menjaga dan mengembangkan hasil.
6. Partisipasi untuk memberikan penilaian hingga sejauh mana pembangunan telah berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Mustanir, dkk dalam Latif (2019 : 8), partisipasi masyarakat dilihat melalui empat tahapan yakni :

1. Tahap asesmen, dilaksanakan dengan mengenali persoalan dan sumberdaya yang tersedia. Dalam tahapan ini masyarakat terlibat aktif untuk melihat persoalan agar benar-benar sesuai dengan realita yang saat itu dirasakan.
2. Tahap alternatif program, pada tahap ini masyarakat diminta untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang tengah mereka hadapi disertai beberapa alternatif program.
3. Tahap implementasi, suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dilaksanakan secara tepat agar tidak melenceng dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
4. Tahap evaluasi, dilakukan dengan melakukan pengawasan mandiri oleh masyarakat serta petugas program.

Dalam bukunya, Iff dan Tesoriero (2016 : 299) memberikan pandangan mengenai partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein dimana partisipasi tidak melulu dipandang sebagai suatu hal yang positif. Arnstein

mengusulkan sebuah model partisipasi untuk memperjelas artian yang berbeda dengan menggunakan ‘tangga partisipasi’ sebagai berikut



Gambar 1.1 Tangga Partisipasi

Melihat dari tipe tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi dapat berkisar dari pengelabuan pemegang kuasa hingga pada masyarakat yang memegang kendali atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam menciptakan suasana dan efektifnya program atau kegiatan tersebut, tentu diperlukan keikutsertaan dari masyarakat. Endah (2019 : 602) menyatakan perlu adanya keikutsertaan dari masyarakat agar suatu program dapat berjalan secara efektif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Putra (2019 : 17) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program dimana semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin meningkat pula efektivitas dari program tersebut. Pendapat dari Lombogia (2018 : 12) juga menguatkan bahwa efektivitas pelaksanaan suatu program dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Sementara Prayogo dan Hilarius dalam Alhakam (2020 : 182) memberikan berbagai indikator

untuk menilai efektivitas program dimana partisipasi menjadi salah satu hal yang berpengaruh didalamnya. Program yang lebih partisipatif akan memberikan hasil seperti peningkatan efektivitas program dan berdampak pada keberhasilan suatu program.

1.5.8 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2020 -2024 Pemerintah Indonesia menargetkan akan penyediaan air minum aman dan sanitasi layak untuk seluruh masyarakat. Dalam skala nasional, capaian akses akan air minum aman baru menyentuh 88% penduduk, sementara untuk sanitasi layak menyentuh 75% penduduk. Dari sekian banyak masyarakat, yang belum menerima akses air bersih aman dan sanitasi yang layak tersebut termasuk dalam masyarakat dengan penghasilan rendah dan termasuk kelompok rentan untuk mendapatkan akses. Maka Pemerintah Indonesia merealisasikan komitmennya dengan meluncurkan program nasional bernama Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Pelaksanaan Program PAMSIMAS dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2020 yang terbagi menjadi tiga periode. Pada periode PAMSIMAS I dilaksanakan pada tahun 2008-2013 dengan terlayannya 5.200 desa. program berlanjut ke PAMSIMAS II yang dilaksanakan pada tahun 2013-2016 dengan terlayannya 6.800 desa. Saat ini Program PAMSIMAS telah memasuki tahap terakhir dengan nama PAMSIMAS III yang dimulai pada tahun 2016-2020 dengan target terlayannya 27.000 desa.

Program PAMSIMAS mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dari pembangunan milenial (MDGs) bidang air minum dan sanitasi yang telah berhasil memberikan sumbangan pelayanan untuk masyarakat pada tahun 2015. Sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 dan juga kelanjutan MDGs yaitu pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memiliki tujuan dalam aspek air minum dan sanitasi, maka pemerintah berkomitmen agar akses air minum dan sanitasi dapat berjalan 100% di seluruh Indonesia.

Program PAMSIMAS memiliki tujuan meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota agar dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, menerapkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan MDGs serta *Universal Akses 2030* dengan pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat. Pelayanan akan air bersih dan sanitasi telah menjadi pelayanan pokok yang harus diberikan oleh pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Program PAMSIMAS berkontribusi dalam membangun sarana prasarana, investasi, dukungan teknik, serta pengembangan kapasitas.

PAMSIMAS merupakan program yang dilaksanakan berbasis pada masyarakat melalui partisipasi dan metode yang tanggap akan kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan dilaksanakan melewati proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memunculkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan program seperti membuat keputusan, perencanaan, persiapan,

pelaksanaan, pengoperasian hingga pemeliharaan sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat.

Program ini memiliki beberapa sasaran diantaranya :

1. Bertambahnya akses air minum aman bagi 22,1 juta jiwa.
2. Bertambahnya akses sanitasi layak bagi 14,9 juta jiwa.
3. Sedikitnya 60% masyarakat dusun yang dituju telah menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
4. 70% masyarakat dusun yang dituju telah menerapkan program Cuci Tangan Pakai Sabun.
5. 70% Pemerintah Daerah Memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi.
6. Pemerintah daerah memiliki penambahan belanja pada sektor air minum dan sanitasi.

Terdapat lima komponen program yang melingkupi program PAMSIMAS yakni :

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan.
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
4. Hibah insentif
5. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program

Program ini merupakan program yang dikerjakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan pelibatan dari berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten hingga dengan desa dan komunitas. Sehingga sebagai bentuk dukungan lancarnya pelaksanaan program perlu adanya persamaan

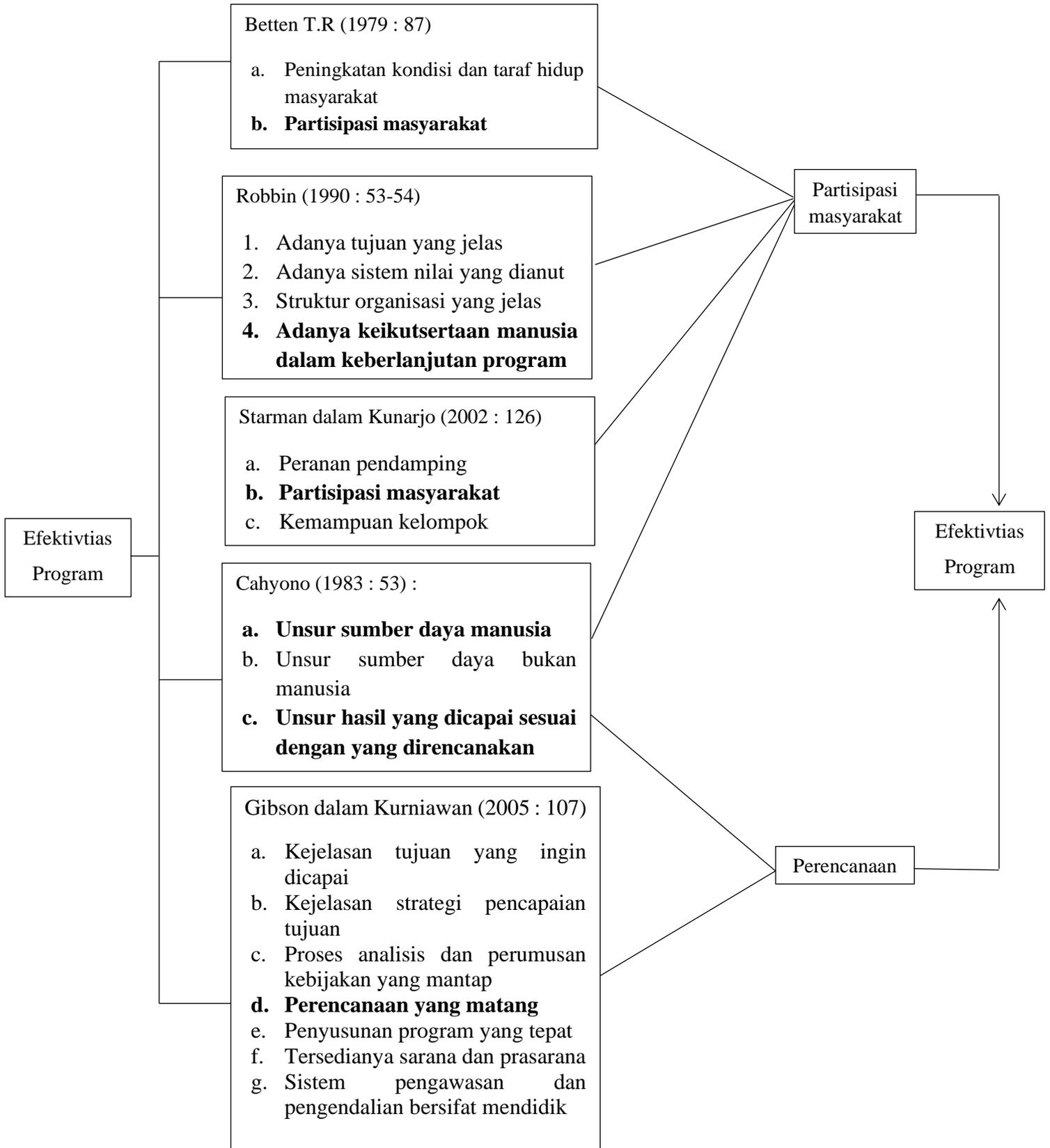
pemikiran dan kapasitas yang memadai dari berbagai pihak yang terlibat. Seperti yang tertuang dalam prinsip Program PAMSIMAS yakni sebagai berikut :

1. Tanggap kebutuhan, diberikan kepada lokasi yang memerlukan dan siap untuk memelihara serta mengelola sistem terbangun.
2. Partisipatif, seluruh masyarakat menjadi pelaku utama dan terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan.
3. Kesetaraan gender, memberikan peluang yang sama kepada laki-laki atau perempuan dalam berpartisipasi.
4. Keberpihakan pada masyarakat miskin, memastikan agar program dapat menjangkau masyarakat miskin.
5. Akses bagi seluruh masyarakat, memastikan semua masyarakat mendapatkan akses akan air minum dan sanitasi.
6. Perlindungan terhadap anak, pelayanan dibangun agar mudah dimanfaatkan dan ramah kepada anak.
7. Keberlanjutan, sarana yang dibangun dan adanya perubahan perilaku dari masyarakat dapat memberikan kebermanfaatan secara terus menerus.
8. Transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan program dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Berbasis nilai, program diselenggarakan berdasar dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong.

1.5.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengkaji mengenai analisis hubungan perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas program PAMSIMAS. Keefektifan suatu program tidak terlepas dari perencanaan yang baik serta peran masyarakat selaku

penerima program, sehingga kehadiran masyarakat sebagai pelaksana program PAMSIMAS menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber : Dari Berbagai Sumber

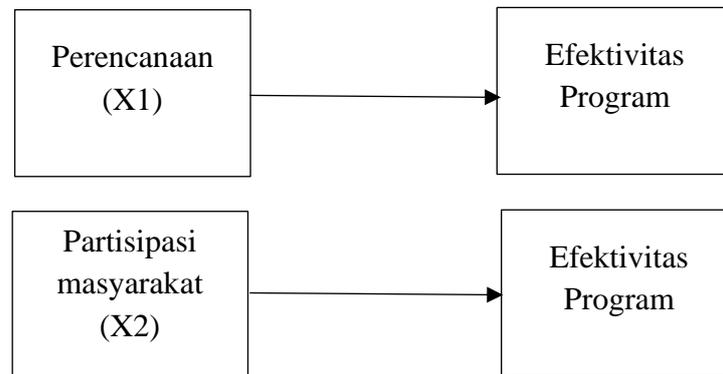
1.6 Hipotesis

Hipotesis menurut Gay dan Diehl dalam Gulo (2002 : 43) berarti hasil sementara seorang peneliti terhadap masalah yang masih berbentuk dugaan karena belum ada bukti kebenarannya. Hipotesis sendiri adalah sebuah dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Sebuah hipotesis dapat dikatakan teruji apabila semua gejala-gejala yang muncul dari hasil penelitian tidak bertentangan dengan hipotesis yang dibuat di awal. Untuk membuktikan hipotesis yang dibuat, seorang peneliti dapat menciptakan suatu gejala secara sengaja ataupun tidak. Hipotesis menjadi salah satu unsur penting ketika melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian metode kuantitatif (Uma dalam Gulo, 2002 :44).

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun, maka hipotesis dari penelitian ini yakni :

a. Hipotesis Minor

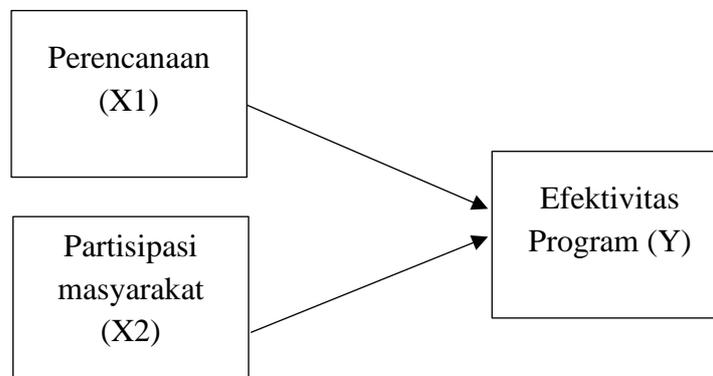
- 1) Terdapat hubungan antara perencanaan dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom.
- 2) Terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom.



Gambar 1.3 Geometrik Hipotesis Minor Penelitian

b. Hipotesis Mayor

Terdapat hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom.



Gambar 1.4 Geometrik Hipotesis Mayor Penelitian

1.7 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu penjelasan pengertian dan karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, dimana acuannya adalah teori atau konsep yang sudah dirumuskan sebelumnya. Agar antara pembaca dengan peneliti

terdapat kesesuaian mengenai pengertian atas variabel yang digunakan diatas, maka perlu adanya definisi konsep sebagai berikut ini :

1. Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan sebuah ukuran dari suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa indikator yang berperan sebagai penentu apakah suatu kebijakan atau program tersebut telah berlangsung dengan efektif selama keberjalanannya.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu pedoman dalam pembuatan sebuah program yang dimana berbentuk rangkaian proses, langkah, atau tindakan berupa pemikiran, garis besar, maupun sebuah petunjuk yang dilakukan pada masa ini untuk mempersiapkan sebuah kegiatan yang sistematis di masa mendatang demi mencapai suatu tujuan tertentu dan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat disini diartikan sebagai suatu usaha secara sadar dan tanpa paksaan yang muncul dari dalam diri individu pada suatu kelompok masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut terlibat dan memberikan kontribusi secara penuh baik dalam bentuk material ataupun non material demi tercapainya tujuan program.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bentuk perincian yang akan digunakan dalam penelitian dimana indikator ini menjadi landasan penyusunan daftar pertanyaan penelitian (kuesioner).

1. Efektivitas Program

Efektivitas dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom dilihat melalui beberapa indikator dimana efektivitas program dinilai dari lima aspek yakni :

- 1) Pemahaman program
- 2) Ketepatan sasaran program
- 3) Ketepatan waktu
- 4) Ketercapaian tujuan
- 5) Perubahan nyata.

2. Perencanaan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa ukuran yang digunakan dalam menilai perencanaan Program PAMSIMAS di Desa Ringinanom diantaranya:

- 1) Kejelasan tujuan dari program yang direncanakan.
- 2) Kesesuaian antara perencanaan program dengan keinginan, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat.
- 3) Kesesuaian antara perencanaan program dengan keadaan lokasi dilaksanakannya program.
- 4) Tingkat kesesuaian program dengan peluang sumber daya alam dan sumber daya manusia di lokasi dilaksanakannya program.

5) Kejelasan spesifikasi kegiatan (waktu, dana, pelaksana) program yang akan dilaksanakan

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Ringinanom dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Partisipasi ketika mengambil keputusan.
- 2) Partisipasi dalam keberjalanan.
- 3) Partisipasi dalam kebermanfaatan.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi.

1.9 Metoda Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti ketika penelitian. Penelitian terbagi menjadi beberapa tipe, diantaranya adalah tipe penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksplanatori. Penelitian berdasarkan tingkat eksplanatori ialah penelitian yang menjabarkan kedudukan variabel yang diteliti beserta hubungan antar variabelnya. Menurut Sugiyono (2018 : 15) penelitian kuantitatif eksplanatori merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan suatu hubungan antara variabel-variabel dengan melakukan pengujian dari hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Populasi menurut Arikunto dalam Aryani (2009 : 57) merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Kemudian menurut Sugiyono dalam Anggara (2015 : 96) populasi diartikan sebagai zona umum dengan kualitas dan karakter yang telah ditentukan oleh peneliti untuk kemudian diambil kesimpulannya. Populasi merupakan seluruh individu yang menjadi tarhet dalam penelitian. Tujuan dilakukannya populasi ialah agar memudahkan kita dalam memberikan ketentuan besarnya sampel yang diambil serta memberikan batasan berlakunya daerah generalisasi. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil yakni seluruh masyarakat Desa Ringinanom yang mendaftar sebagai peserta Program PAMSIMAS yang terdiri dari 102 peserta.

1.9.2.2 Sampel

Sampel sebagai bagian populasi yang memberikan gambaran mengenai populasi secara benar (Gulo, 2002 : 55). Sampel merupakan anggota atau bagian dari suatu populasi. Sampel sangat diperlukan dalam penelitian karena terkait dengan kredibilitas dan mutu penelitian serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan penelitian.

Besarnya sampel yang dijadikan populasi bergantung pada variasi dalam kalangan populasi itu sendiri. Apabila anggota populasi homogen, maka kita dapat mengambil sampel dalam jumlah kecil, begitu juga sebaliknya. Semakin homogen suatu populasi, maka semakin kecil sampel yang dapat digunakan dan makin

banyak variasi maka semakin besar pula sampel yang harus diambil (Gulo, 2002 : 56).

Sampel yang diambil terdiri dari masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PAMSIMAS. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan sama dengan populasi, yakni sebanyak 102 masyarakat Desa Ringinanom yang turut terdaftar sebagai peserta Program PAMSIMAS.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ialah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti ketika ingin mendapatkan sampel suatu populasi. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *non probability sampling*, hanya masyarakat Desa Ringinanom yang menjadi peserta Program PAMSIMAS saja yang dapat menjadi objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah sensus atau sampling total dimana sampel yang diambil merupakan anggota dari populasi (Sugiyono, 2018 : 81), sehingga terpilih sebanyak 102 masyarakat sebagai responden.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, dimana termasuk dalam jenis data yang dapat diukur atau dihitung, serta data yang berupa informasi atau penjelasan dan berbentuk angka.

Sumber data merupakan tempat atau asal kita mendapatkan data penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti ialah sumber data primer dan sekunder :

1. Kuesioner / Angket

Metode kuesioner ialah metode untuk menghimpun data melalui proses memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada sampel yang telah ditentukan (responden) untuk kemudian dijawab. Metode ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara melalui pencatatan dokumen, arsip, foto, dan lain-lain. Selain itu juga melakukan observasi langsung pada objek yang berada di tempat penelitian. Metode ini menjadi sumber data sekunder untuk mendukung penambahan informasi dalam penelitian.

1.9.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran berarti pedoman yang digunakan ketika akan menentukan panjang pendeknya suatu interval yang digunakan dalam alat ukur untuk menghasilkan data dalam bentuk kuantitatif (Anggara, 2015 : 107). Skala pengukuran ini menjadi penentu pemilihan alat uji hipotesis dalam penelitian kita. Pada dasarnya penggunaan skala ini dapat digunakan dalam segala bidang, hanya berbeda dalam isi dan penekannya.

Penelitian ini menggunakan skala *Likert*, dimana memiliki fungsi untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi sekelompok atau seseorang mengenai suatu fenomena sosial. Melalui skala ini, variabel yang diteliti diperluas menjadi beberapa indikator variabel yang akan menjadi daftar pertanyaan. Jawaban untuk

tiap pertanyaan tersebut memiliki tingkatan dari yang bernilai positif hingga negatif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom. Kuesioner dilakukan dengan disebarkan kepada 102 responden. Ukuran yang digunakan untuk kuesioner yang disebarkan menggunakan skala *Likert* dimana yang digunakan adalah bentuk ordinal. Responden ditanya dengan pertanyaan dan telah tersedia jawaban yakni skala 4 sebagai nilai tertinggi dan skala 1 sebagai nilai terendah.

Kuesioner yang disusun dengan skala *Likert* memiliki empat tingkatan yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

Pada skala *Likert*, pemberian skor atau nilai yang sesuai menjadi pedoman dalam menentukan indikator atau pernyataan yang terkandung dalam jawaban kuesioner para responden. Pemberian skor tersebut menggunakan interval atau jarak yang dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

R = Range (Skor Tertinggi – Skor Terendah)

K = Banyaknya Kelas

Sehingga penghitungan interval pada penelitian ini menjadi :

$$\begin{aligned} I &= \frac{(4 - 1)}{4} \\ &= \frac{3}{4} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Maka dapat dibuat tabel interval kesesuaian yakni sebagai berikut :

Tabel 1.7 Kesesuaian Skala Likert

Skala	Kategori Penilaian
1 – 1,75	Sangat Tidak Setuju
1,76 – 2,50	Tidak Setuju
2,51 – 3,25	Setuju
3,26 - 4	Sangat Setuju

Sumber : Penulis 2022

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan ketika penelitian untuk mendapatkan data suatu subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ialah data hasil korelasi antara partisipasi masyarakat

dengan efektivitas program PAMSIMAS di Desa Ringinanom. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner disebut juga sebagai daftar pertanyaan. Angket ialah sebuah cara mengumpulkan data melalui cara peneliti menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk kemudian diisi (Anggara, 2015 : 116). Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang hubungan dari perencanaan dan partisipasi masyarakat dengan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ringinanom. Data yang akan diambil adalah tingkat partisipasi masyarakat Desa Ringinanom dan efektivitas dari Program PAMSIMAS di desa untuk kemudian dicari korelasi diantara kedua variabel tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden kemudian jawaban tersebut dicatat atau direkam (Anggara, 2015 : 113). Menurut Muhammad Ali dalam Anggara (2015 : 113), mengemukakan salah satu alasan digunakannya teknik wawancara adalah untuk memperbaiki ataupun memperdalam hasil yang diperoleh dari teknik lainnya seperti observasi atau angket terhadap objek manusia. Metode ini dilakukan untuk memperdalam dan juga melengkapi data-data yang belum jelas. Metode ini ditujukan pada pihak yang relevan yakni masyarakat Desa Ringinanom dan pengelola PAMSIMAS Desa Ringinanom.

3. Metode Observasi

Teknik ini digunakan untuk menemukan sebuah informasi atau mengumpulkan data dari sebuah kejadian yang berdasar pada tujuan penelitian (Anggara, 2015 : 109). Dalam penelitian ini, observasi tidak digunakan sebagai metode penelitian utama penulis. Akan tetapi metode ini berperan sebagai pendukung akan hasil penelitian yang dihasilkan. Selain itu metode ini cukup relevan dengan fokus penelitian yaitu tentang perubahan perilaku masyarakat.

4. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data secara tidak langsung yakni melalui dokumen. Menurut Sedarmayanti dalam Anggara (2015 : 121), dokumen berarti catatan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau lembaga yang bermanfaat sebagai sumber data yang sulit didapatkan, sehingga membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumen sendiri beragam bentuknya, dapat berupa arsip data, surat, gambar dan benda peninggalan.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data akses air minum ASEAN, data sebaran peserta program PAMSIMAS di Kabupaten Temanggung, laporan peserta program PAMSIMAS Kabupaten Temanggung, pendaftar program PAMSIMAS di Desa Ringinanom. Data tersebut memiliki kegunaan sebagai penunjang penelitian yang dilakukan.

1.9.7 Instrumen Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran, maka harus ada sebuah alat ukur dalam membantu peneliti menugumpulkan data (Anggara, 2015 : 125). Agar teknik pengumpulan data yang telah ditentukan dapat digunakan, maka dibutuhkan suatu alat yang dinamakan instrumen penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni angket/kuesioner. Hal ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang ditetapkan sebelumnya yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun dengan melihat pada responden yang menjadi sumber data penelitian. Kuesioner dibuat semudah dan sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh responden.

1.9.8 Teknik Analisis

Menganalisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah mengolah data untuk kemudian dapat diinterpretasikan. Analisis adalah pengelompokkan, pembuatan urutan, memanipulasi serta merangkum data yang ditemukan selama penelitian agar dapat lebih mudah untuk dibaca (Anggara, 2015 : 136). Banyaknya data yang terkumpul belum memberikan jaminan mendapatkan hasil penelitian yang baik. Keadaan tersebut sangat ditentukan pada bagaimana data tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa angket dimana termasuk dalam data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka untuk kemudian dijabarkan kedalam sebuah susunan kalimat yang sesuai dengan hasil.

1.9.8.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Untuk pengujian pertanyaan, menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* dengan koefisien 5%.

Syarat agar pertanyaan termasuk kategori valid adalah sebagai berikut :

- a. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan dalam angket memiliki korelasi signifikan terhadap skor total sehingga dinyatakan valid.
- b. Apabila nilai r hitung $<$ r tabel, maka pertanyaan dalam angket tidak memiliki korelasi signifikan terhadap skor total sehingga dinyatakan tidak valid.

Uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* dengan menggunakan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[(N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2) \cdot (N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)]}}$$

Keterangan :

R_{xy} = koefisien korelasi antara x dan y

N = banyaknya observasi / responden

ΣX = jumlah skor tiap butir

ΣY = skor total

ΣXY = jumlah hasil kali skor x dengan y

X^2 = kuadrat skor x

Y^2 = kuadrat skor y

1.9.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran mengenai keteraturan responden dalam memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tersusun sebagai kuesioner untuk mendapatkan data mengenai suatu variabel. Uji reliabilitas dihitung dengan metode *alpha cronbach*. Apabila nilai dari *alpha cronbach* 0,6 maka kriteria dalam penelitian ini adalah instrumen dinyatakan reliabel jika $\alpha > 0,60$ dan instrumen dinyatakan tidak reliabel jika $\alpha < 0,60$.

$$r_{ac} = \left(\frac{k}{(k - 1)} \right) \left(1 - \frac{\Sigma \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan :

r_{ac} = koefisien reliabilitas alpha cronbach

k = banyak pertanyaan

$\Sigma \sigma b^2$ = total variasi per pertanyaan

σt^2 = total variasi

1.9.8.3 Koefisien Korelasi Kendall Tau

Korelasi rank Kendall digunakan untuk menguji hubungan atau menguji hipotesis antara dua atau lebih variabel dalam bentuk data ordinal (Sugiyono, 2004 : 117). Rumus ini digunakan untuk mengetahui adakah hubungan antara variabel Perencanaan (X1), variabel Partisipasi Masyarakat (X2) dengan variabel Efektivitas Program (Y) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{N}{2} (N - 1)}$$

Keterangan :

τ = koefisien korelasi Kendall Tau

S = skor sebenarnya

N = ukuran sampel

Apabila terdapat nilai yang sama maka menggunakan rumus :

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{N}{2} (N - 1) - T_x} \sqrt{\frac{N}{2} (N - 1) - T_y}}$$

Keterangan :

$T_x = \frac{1}{2} \sum t (t - 1)$ banyaknya angka yang sama dalam kelompok X

$T_y = \frac{1}{2} \sum t (t - 1)$ banyaknya angka yang sama dalam kelompok Y

Metode dalam penelitian ini adalah menolak H0 dan menerima H1, adapun taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% dan hasil taraf signifikan dapat dilihat menggunakan program SPSS. Maka terdapat ketentuan dalam pengujian yang digunakan dalam melihat hubungan antar variabel sebagai berikut :

- a. H0 = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Program PAMSIMAS
- b. H1 = terdapat hubungan yang signifikan antara Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Program PAMSIMAS

Sedangkan untuk pengujian signifikansi koefisien Kendall maka digunakan rumus :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N + 5)}{9N(N - 1)}}}$$

Keterangan :

Z = hasil hitung yang akan dikonsultasikan

T = koefisien korelasi Kendall

N = jumlah responden dalam sampel

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan Z observasi dengan kriteria :

- a. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, maka hipotesis diterima.
- b. Apabila $Z_0 < Z_t$ pada taraf signifikansi berarti tidak signifikan, maka hipotesis ditolak.

Pengukuran besar kecilnya korelasi ditentukan menggunakan skala koefisien dan tingkat korelasi sebagai berikut :

Tabel 1.8 Skala Koefisien dan Tingkat Korelasi

0,00 – 0,19	Korelasi Sangat Lemah
0,20 – 0,39	Korelasi Lemah
0,40 – 0,59	Korelasi Sedang
0,60 – 0,79	Korelasi Kuat
0,80 – 1,00	Korelasi Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2018

1.9.8.4 Koefisien Konkordansi Kendall

Koefisien korelasi ini merupakan tahap lanjutan dari korelasi Kendall Tau sebelumnya. Perbedaannya yakni pada koefisien korelasi ini digunakan lebih dari dua variabel dan hubungannya dapat dilihat secara stimulan. Dengan menggunakan koefisien konkordansi Kendall, maka dapat diketahui ada tidaknya hubungan dari variabel Perencanaan (X1), variabel Partisipasi Masyarakat (X2), dan variabel Efektivitas Program (Y) secara bersama. Perhitungan konkordansi Kendall (W) dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}k^2(N^3 - N)}$$

dengan

$$S = \sum (RJ - \frac{\sum RJ}{N})^2$$

Keterangan :

S = jumlah kuadrat deviasi observasi dari mean (RJ)

RJ = mean dari ranking

K = banyaknya himpunan ranking perjenjang

$\frac{1}{12}k^2(N^3 - N)$ = jumlah S yang akan terjadi dengan adanya kecocokan sempurna
antara K ranking

Apabila terdapat nilai yang sama, maka r_s (korelasi ganda) menggunakan rumus :

$$W = \frac{S}{\left\{ \frac{1}{12}k^2(n^3 - n) \right\} - k \sum T}$$

dengan

$$T = \frac{\sum(t^3 - t)}{12}$$

Keterangan :

\sum = jumlah kelompok angka sama dalam masing-masing K ranking

T = jumlah nilai T untuk semua ranking

t = banyakn observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu

Pengujian taraf signifikan dilakukan dengan cara memasukkan nilai W kedalam rumus *chi square* yaitu :

$$X^2 = k(n - 1)W$$

Keterangan :

X^2 = test *chi square*

W = koefisien konkordansi Kendall

K = jumlah variabel

N = banyaknya objek atau individu yang diberi ranking

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan nilai kritik chi square dengan rumus $db = N-1$, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila $X^2_0 > X^2_1$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima
- b. Apabila $X^2_0 < X^2_1$ pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak

1.9.8.5 Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan dalam melihat persentase seberapa besarnya kontribusi atau hubungan variabel bebas yakni variabel Perencanaan (X_1), variabel

Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan maupun parsial terhadap kenaikan atau penurunan variabel terikat yakni variabel Efektivitas Program (Y). Rumus dari koefisien determinasi yaitu :

$$R = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R = koefisien determinasi

r^2 = kuadrat korelasi